

BAB IV

FAKTOR POLITIK DOMESTIK DALAM MEMPERJUANGKAN NASIB ETNIS ROHINGYA

Pada bab empat ini, penulis akan memaparkan mengenai faktor politik domestik memperjuangkan nasib etnis Rohingya. Bab ini akan dibagi menjadi 4 sub bab, yaitu, *Pertama*, Kondisi domestik: Indonesia sebagai negara demokrasi. *Kedua*, pengaruh politik domestik: *policy influencers* yang terdiri dari beberapa aktor-aktor, seperti: Partai politik (PAN, PKS), Ormas Islam (Muhammadiyah, PBNU), Ormas semi-pemerintah (MUI) dan Pergerakan mahasiswa (KAMMI). *Ketiga*, Artikulasi Masyarakat: demonstrasi dan liputan media massa. *Keempat*, Implikasi bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Kondisi domestik: Indonesia sebagai negara demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal dengan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila.

Munculnya Kekuatan Politik Baru yang Pragmatis Pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat dan politisi. Memang secara nyata melihat perubahan yang sangat besar, dari rezim yang otoriter menjadi era penuh keterbukaan. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan dan pengaruh kebijakan. Demokrasi tidak dapat diabaikan sebagai elemen utama dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini ada dukungan yang luas dari publik, terutama dari kalangan akademisi, aktivis, LSM dan anggota parlemen, untuk masuknya nilai-nilai demokrasi kedalam kebijakan luar negeri.

Sistem Demokrasi telah memperbesar porsi *policy influencer* untuk semakin mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sebab didalam pemerintahan yang demokratis, *policy influencer* sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Dukungan dan desakan *policy influencers* yang kuat tercermin dalam banyaknya partai-partai Islam, organisasi Islam, organisasi semi

Pemerintah menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar.⁸³

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan luar negeri Republik Indonesia tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Pengaruh politik domestik: *Policy Influencers*

Indonesia dalam memperjuangkan nasib etnis Rohingya tidaklah lepas dari *policy influencer* yang berada di sekeliling para pengambil kebijakan. Selain itu kondisi Politik Dalam Negeri Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi telah memperbesar porsi *policy influencer* untuk semakin mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Berikut ini *Policy Influencer* yang mempengaruhi pemerintah:

⁸³ *Indonesia menjadi model bagi hubungan islam dan demokrasi* ,<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/16-maret-2012/1368/indonesia-menjadi-model-bagi-hubungan-islam-dan->

1. Partai Politik

1.1. Partai Amanat Nasional (PAN)

Asas partai ini adalah akhlak politik berlandaskan Agama yang membawa Rahmat bagi Sekalian Alam. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Ketua Umum adalah Hatta Rajasa. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Amien Rais.⁸⁴ Ir. H. Muhammad Najib yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) menyikapi tentang etnis Rohingya adalah mendukung dan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia tenggara harus mampu membantu muslim di Rohingya. Kemudian, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar secara politik maupun ekonomi, tentu Indonesia secara terbuka atau tidak memainkan peran yang sangat penting di Myanmar.

Najib memaparkan kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Senin 13 Agustus 2012, “Memang negara Myanmar ada agama minoritas, dan etnis Rohingya ini salah satu etnis kecil di Myanmar. Konflik di Myanmar bisa muncul setiap saat, dan konflik Rohingya ini sudah berkali-kali terjadi dengan dipicu hal-hal yang terkadang kecil. Di Indonesia ada sejumlah pengungsi Rohingya dan Indonesia berusaha memberikan yang terbaik kepada pengungsi Rohingya, termasuk tidak memulangkan secara paksa pengungsi

⁸⁴ www.seputarnusantara.com, “Najib: Konflik Rohingya Bisa Muncul Setiap Saat”, diakses pada

Rohingya ke negara Myanmar. Jadi, Indonesia konsisten dan terus menerus berusaha agar pemerintah Myanmar bisa menghormati HAM.⁸⁵

1.2. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002. PKS menyikapi etnis Rohingya adalah mendukung.⁸⁶ Salah satu kader tokoh PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Fahri Hamzah pada Juli 2012, mengatakan tanpa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Myanmar tidak akan pernah tahu perkembangan politik modern. Namun faktanya, Myanmar justru menjadi negara yang tidak tahu diri. Menurutnya, pembantaian etnis Muslim di Myanmar jelas melukai komunitas Islam yang ada di ASEAN. Seperti yang diungkap Fahri:

“Myanmar itu dulukan negara antah beranta (terbelakang), mereka tahun peradaban modern karena ASEAN. Sekarang mereka justru mengangkai nilai kebersamaan ASEAN. Tolong diingat, di ASEAN itu negara paling berpengaruh ada dua, dan itu negara mayoritas Muslim. Indonesia dan Malaysia, jadi melakukan diskriminasi terhadap muslim Rohingya jelas itu sangat melukai kami.” Selain itu, Fahri Hamzah menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan SBY atas kasus Rohingya. Menurutnya sikap pemerintah Indonesia dalam kasus Rohingya ini masih ambigu, abu-abu dan tidak jelas. Sudah jelas di sana militer itu bukan meredam konflik, tapi ikut membantai masyarakat Rohingya. Ambil sikap yang jelas dong jangan ambigu, ini kritik saya terhadap SBY.”

⁸⁵ PAN, *Indonesia berikan pelayanan terbaik bagi pengungsi bagi Rohingya*. <http://seputar nusantara.com/2012/08/13?p=14220>. (diakses pada 13 Agustus 2012).

⁸⁶ Fahri Hamzah, *Sikapnya*. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera. (diakses

Menurut Fahri, Indonesia seharusnya menggunakan hak vetonya di ASEAN. Indonesia mempunyai kekuatan untuk menekan. Terlebih selama ini peran Indonesia jugalah yang akhirnya membuat Myanmar bisa diterima di ASEAN.⁸⁷ Untuk mengatasi masalah etnis Rohingya, pemerintah harus melakukan penekanan terhadap Myanmar mengingat prinsip Piagam ASEAN adalah menghentikan penindasan terhadap Rohingya dan menghormati HAM, Pemerintah diminta memberi perlindungan dan bantuan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri untuk tidak mendeportasi warga Rohingya yang ada di Indonesia dengan terlalu keburu-buru menganggap mereka sebagai “*economic migrant*” tetapi mereka adalah korban dari pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar dan juga menyoroti lemahnya perhatian kalangan kepada pengungsi Rohingya yang sebenarnya mencapai ribuan orang yang menyelamatkan diri dari tindakan penguasa Myanmar.⁸⁸

2. Organisasi masyarakat Islam

2.1. Muhammadiyah

Tokoh lintas agama Drs. H. Zayyin Chudlori, M.Ag (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya) menyikapi etnis Rohingya yang berada di Indonesia adalah mendukung. Tragedi pembantaian etnis muslim Rohingya di Myanmar merupakan sebuah tindak kriminal kemanusiaan yang menyalahi HAM. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya sudah berlangsung semenjak etnis

⁸⁷ Fahri Hamzah: “*Myanmar Menjadi Negara yang Tidak Tahu Diri*”
Hidayatullah.com.(diakses pada 10 Agustus 2012).

⁸⁸ *Minta Myanmar Hentikan penindasan di Rohingya.* <http://www.antaraneews.com/view/?i=>

yang berasal dari Bangladesh ini bermukim di wilayah bagian barat Myanmar.

Perilaku keji dan cenderung diskriminatif sering mendera etnis Rohingya.

Etnis Rohingya adalah masyarakat muslim yang hidup tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Muslim Myanmar hanya berjumlah 4% dari total populasi Myanmar dan menjadikan etnis Rohingya minoritas. Mencuatnya tragedi pembunuhan etnis Rohingnya muncul pada bulan Juni 2012, tidak lama setelah Aung San Suu Kyi memenangi pemilihan parlementer Myanmar yang sampai saat ini masih dikuasai oleh rezim militer dengan presiden Thein Sein. Kekejaman penderitaan dan perlakuan diskriminatif yang dialami merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh rezim militer di negara tersebut. Cukup sudah penderitaan yang mesti dialami etnis Rohingya di Myanmar.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan, sudah saatnya gelorakan pembebasan dan perlakuan yang sama bagi etnis Rohingya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sudah seharusnya bangsa Indonesia peduli terhadap muslim Rohingya. Indonesia menjunjung HAM dan juga terkait dengan pembukaan UUD RI tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁸⁹ Din Syamsudin yang merupakan pimpinan Ormas Muhammadiyah pada 2009 pernah membuat pernyataan bahwa jika pemerintah tidak sanggup lagi menyokong etnis

⁸⁹ *Netiakah Rohingya*, <http://sechud.kompasiana.com/2012/08/03/netiakah-rohingya> (diakses

Rohingya, maka Muhammadiyah siap menampung para pengungsi tersebut.⁹⁰ Muhammadiyah membuka cakrawala hati setiap umat manusia agar mau peduli dan membantu muslim Rohingya untuk mendapat hak dan kemerdekaan hidup yang sama dengan warga lainnya di dunia. Dukungan Muhammadiyah terhadap etnis Rohingya, diantaranya:⁹¹

- i. Mengutuk tragedi kemanusiaan pembantaian muslim Rohingya, Oleh karena itu, mendesak masyarakat internasional untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam menghentikan pembantaian umat Islam tersebut.
- ii. Mengharap kepada pemerintah Indonesia, agar turut serta secara tanggap dan aktif menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga warga Rohingya bisa merasakan kedamaian dan bisa hidup berdampingan dengan warga Myanmar lainnya.
- iii. Kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga negara Indonesia tetap kondusif, aman, tentram dan diridhoi Allah SWT.
- iv. Meyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu secara moril maupun materil serta mendoakan saudara-saudara etnis Rohingya.

⁹⁰ M.Din Syamsudin - Muhammadiyah Siap Membantu para Pengungsi Muslim Rohingya. http://www.mdinsyamsudin.com/index.php/Muhamadiyah_Siap_Membantu_para_pengungsi_Muslim_Rohingya_html.(diakses pada 20 Oktober 2012).

⁹¹ http://www.mdinsyamsudin.com/index.php/Muhamadiyah_Siap_Membantu_para_pengungsi_Muslim_Rohingya_html.(diakses pada 20 Oktober 2012).

2.2. PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama)

Ormas Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama menyikapi etnis Rohingya yang berada di Indonesia adalah mendukung, dan tidak akan tinggal diam terhadap persoalan kekerasan yang dihadapi oleh umat Islam termasuk salah satunya adalah mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Rohingya. PBNU akan membantu mencari solusi atas permasalahan manusia perahu etnis Rohingya yang terdampar di Sabang, Nangroe Aceh Darusalam. Ketua PBNU pada 2009, Masyukuri Abdillah menjelaskan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh PBNU, antara lain:

- i. Melakukan verifikasi, apa sebenarnya tujuan yang dilakukan sehingga mereka mengungsi. Jika memang ada persoalan kebebasan menjalankan agama, maka pemerintah Indonesia perlu memberi bantuan dan perlindungan. Informasi terbaru yang diperolehnya menyatakan mereka mengungsi salah satunya karena tidak adanya kebebasan dalam beragama, bukan sekedar alasan ekonomi yang selama ini diberitakan.
- ii. NU Bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani Etnis Rohingya.⁹²

Hasyim Muzadi yang merupakan tokoh NU setuju dengan pendapat dari Muhammadiyah. "Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar didunia dan

⁹² *PBNU akan bantu pengungsi Rohingya.* http://www.nu.or.id/page.php/page.php?ang&menu=news_view&news_id=2012/07/16140 (diakses pada 13 Oktober 2012)

sesama negara ASEAN, Indonesia sebaiknya turut berpartisipasi ikut membantu.⁹³

Setelah mendengar Penindasan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, tahun 2012 kembali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertimbangkan untuk mengirim misi kemanusiaan ke Myanmar. Misi kemanusiaan itu untuk meringankan penderitaan Muslim Rohingya yang kini ditindas oleh Pemerintah Myanmar.

3. Organisasi Semi-pemerintah

3.1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyikapi etnis Rohingya adalah mendukung dan MUI turut ikut menyumbang suara mereka terkait bantuan moril maupun materil kepada kaum teraniaya tersebut. Pemerintah Indonesia dapat melakukan berbagai langkah kongkrit sebab Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara sehingga memiliki tanggung jawab besar atas penderitaan muslim Rohingya.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Pusat, Saleh Daulay mengatakan MUI berpandangan “bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya dapat melakukan langkah-langkah kongkrit dalam melakukan diplomasi baik di tingkat global maupun regional bagi upaya penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tentu Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada negara-negara lain.”

⁹³ *Ormas Islam desak Pemerintah Bantu Rohingya.* <http://republika.co.id:8080/koran/14/29289/>
Ormas Islam Desak Pemerintah Bantu Rohingya (diakses pada 20 Oktober 2012)

Dalam pertemuan yang digelar di Kemlu, Menlu didampingi Direktorat Jenderal Asia Pasifik Yuri Octavian Thamrin, Direktorat Jenderal Multilateral Hasan Kleib, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Abdurrahman M. Fachir, sedangkan delegasi MUI dipimpin KH Ma'ruf Amin, dengan didampingi KH. Muhyiddin Junaidi, Dr. Amirsyah Tambunan, Prof. Dr. Amany Lubis, Dr. Saleh Daulay, H. M. Natsir Jubaidi, dan Hj. Machsanah Asnawi. MUI meminta agar pemerintah RI secara kelembagaan dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai negara yang menghargai hak-hak Asasi Manusia, tentu hal ini penting dilakukan oleh Indonesia terutama untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia Internasional.

Sementara Menlu Marty Natalegawa berjanji akan menindaklanjuti usulan MUI setelah berkoordinasi dengan berbagai instansi. Marty menyambut baik usulan MUI agar pemerintah Indonesia ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah setelah berkordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait.⁹⁴ Prihatin terhadap nasib etnis muslim Rohingya di Myanmar, Menurut data dari MUI sudah enam ribu orang tewas akibat tindakan represif terhadap suku Rohingya.

⁹⁴ *Mui Temui Menlu desak pemerintah RI bantu muslim Rohingya.* <http://m.voa-islam.com/>

4. Pergerakan Mahasiswa

4.1. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

KAMMI merupakan sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya tanggal 29 Maret 1998. Puluhan anggota KAMMI, menuntut agar Pemerintah Indonesia mengancam diskriminasi yang dilakukan Myanmar terhadap muslim Rohingya. Prinsip Gerakan KAMMI: Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI, Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI, Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI, Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI, Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI, Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI.⁹⁶

KAMMI pada 30 Juli 2012 melalui deplu mendesak agar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil inisiatif untuk dapat membantu dan menolong etnis Rohingya yang keberadaannya semakin memprihatinkan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Salah satu anggota yang aktif dalam KAMMI, Muhammad Iqbal Nurulhaq, menyatakan: “KAMMI menuntut pemerintah untuk peduli terhadap permasalahan Rohingya dan menuntut implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Kecaman dan keprihatinan atas pembantaian Muslim Suku Rohingya terus berlanjut. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta

⁹⁶ *Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia*. http://id.wikipedia.org/wiki/Kesatuan_Aksi_Mahasiswa_Muslim_Indonesia. (diakses pada 25 Oktober 2012).

ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaannya jika pemerintah di sana tak bisa menghentikan aksi kekerasan. Mereka juga mendesak OKI turun tangan menekan pemerintah junta militer. Ketua Umum KAMMI Aceh, Faisal Qasim mengatakan “ASEAN harus mengeluarkan Myanmar sebagai anggota, sebagai negara tidak beradab yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan Indonesia harus terus berjuang dalam ranah diplomasi regional dan international dalam memperjuangkan kesamaan hak, penghentian kekerasan, dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.”⁹⁷

KAMMI mendesak Pemerintah Myanmar segera membuka blokade militer, politik, dan ekonomi jika mereka tetap bersikeras terhadap warga Rohingya, serta tidak mengakui status etnis tersebut sebagai bagian dari Myanmar. Jika Pemerintah Junta Militer, KAMMI menyerukan negara-negara di Asia Tenggara untuk memboikot SEA Games ke-27 sebagai bentuk protes.

C. Artikulasi masyarakat Muslim

1. Demonstrasi

Demonstrasi atau demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau penentang kebijakan yang dilaksanakan

⁹⁷ ASEAN didesak copot keanggotaan Myanmar. <http://news.okezone.com/read/2012/07/30/340/670610> (diakses pada 20 Oktober 2012)

suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.⁹⁸

Para aktifis dari berbagai partai Islam, organisasi Masyarakat Islam, pergerakan mahasiswa Islam, menggelar demonstrasi di depan Gedung sekretariat ASEAN. Menuntut agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Heru Susetyo, coordinator Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan mengatakan: "ASEAN harus malu karena sebagai organisasi yang cinta damai, malah akan menjadikan Myanmar ketua tahun depan. Kita juga mengajak untuk memboikot pelaksanaan SEA GAMES 2013 di Myanmar, jika kejahatan kemanusiaan masih berlangsung di Myanmar." Para pengunjung rasa melakukan aksinya dengan menggembrok gerbang Gedung Sekretariat ASEAN sebagai simbol ketidakberdayaan ASEAN untuk bersikap tegas terhadap Myanmar. Dalam unjuk rasa ini, para pengunjung rasa juga membakar replika bendera Myanmar.⁹⁹

Aksi para demonstiran yang bergabung dalam Masyarakat Peduli Rohingya (MPR), diantaranya terdapat partai seperti PAN, PKS, PKB. Dan ada Tokoh dari organisasi lainnya berunjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, pada Kamis, 9 Agustus 2012. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan orang tersebut diwarnai dengan aksi "*lontar jumroh*". Berbeda dengan ritual lontar jumroh di Mekkah yang menggunakan batu, para demonstiran melakukannya dengan

⁹⁸ *Demonstrasi*. <http://id.wikipedia.org/wiki/demonstrasi>. (diakses pada 20 Oktober 2012).

⁹⁹ *Demonstrasi didepan Gedung Sekretariat*. <http://idbloggerbuzz.blogspot.com/2012/07/30/Demonstrasi-didepan-gedung-sekretariat/> (diakses pada 21 Oktober 2012)

melempar segenggam kertas putih ke halaman Kedutaan Myanmar. Ritual lontar jumroh tersebut dilakukan secara bersamaan. Dua orang perwakilan demonstran dipersilahkan menyegel kantor kedutaan. Mereka menyegel kantor dengan membentangkan pita kuning serta memasang kaos putih berlumuran darah lengkap dengan spanduk yang bertuliskan "*Stop Violence, Save Muslim Rohingya*". Dalam aksi demonstrasi tersebut, para pengunjung rasa menyampaikan enam tuntutan dalam menyikapi aksi kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya.

Pertama, mengutuk segala bentuk aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap kaum muslim minoritas Rohingya. *Kedua*, mendesak pemerintah dan masyarakat Myanmar menghentikan upaya pembersihan etnis terhadap kaum minoritas Rohingya. *Ketiga*, menuntut pemerintah Myanmar untuk mengakui eksistensi etnis Rohingya sebagai warga Myanmar, sebagaimana 135 etnis lainnya. *Keempat*, mendesak OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk mengambil langkah-langkah diplomatik dalam mencari solusi bagi masyarakat Rohingya. *Kelima*, memulangkan Dubes Myanmar dan tidak mendukung Myanmar sebagai Ketua ASEAN sampai pemerintah Myanmar memulihkan kembali hak warga etnis Rohingya. *Enam*, mendesak negara penampung para pengungsi Rohingya untuk memperlakukan mereka sebaik mungkin.

Para demonstran kecewa karena hingga saat ini belum ada pihak dari Kedubes Myanmar yang menanggapi tuntutan para demonstran. Sebagai bentuk

protes, para demonstran menyegel gerbang utama Kedubes Myanmar. Ahmad

kordinator aksi: dalam aksi ini "Kami akan datang dengan massa yang lebih banyak untuk menuntut pemerintah kita dan OKI, mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya, dan mengakui mereka sebagai salah satu etnik di Myanmar."¹⁰⁰

KAMMI kantor pusat juga telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Association of South East Asian Nations (ASEAN). Dalam aksi itu KAMMI membawa tuntutan, yaitu mengutuk kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, baik yang terjadi di dalam maupun di luar Myanmar. Para pendemo juga menggelar aksi yang menggambarkan tentang etnis Rohingya yang mendapat perlakuan diskriminasi berupa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai tindakan lainnya.¹⁰¹

2. Liputan media massa

Media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi kesegala arah kepada publik dan institusi lainnya. Media memainkan peran penting dalam arena konflik, dimana suara para jurnalis menentukan pihak mana dalam suatu konflik yang dianggap sebagai korban, pelaku, pihak yang tertindas. Dengan sekedar melaporkan fakta, media secara terus menerus mempengaruhi perkembangan suatu peristiwa.

¹⁰⁰ Masyarakat peduli Rohingya unjuk rasa di Kedubes Myanmar. <http://zonadamai.wordpress.com/2012/08/09/masyarakat-peduli-rohingya-unjuk-rasa-di-kedubes-myanmar>. (diakses pada 19 Oktober 2012).

¹⁰¹ SBY didesak bantu Muslim Rohingya. <http://www.jpnn.com/read/2012/08/04/SBY-desak->

Siaran Pers kepada para wartawan di Medan, 6 Agustus 2012 – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan (PDM Medan) Drs. Adri K dan Sekretaris Muhammad Syafi'i Lubis di Sekretariat menyerukan kepada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ranting untuk menyelenggarakan Shalat Ghaib dan penggalangan dana untuk Rohingya. Pengumpulan dana ini sesuai dengan anjuran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. DR Din Syamsuddin. Penyalurannya dapat dilakukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan dan selanjutnya PDM Medan akan menyalurkannya kepada pengungsi Rohingya.¹⁰²

SBY juga mengutus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla pada Agustus 2012 untuk menjadi utusan kasus Myanmar dan langsung bertemu dengan Presiden Thein Sein. Dalam pertemuan di Myanmar tersebut, Jusuf Kalla menggunakan Diplomasi Sarung untuk mendekatkan RI dengan Myanmar. Penampilan sehari-hari orang Myanmar mirip dengan sebagian masyarakat di Tanah Air yaitu kesamaan mengenakan kain sarung. Dalam kesamaan ini menjadi "pintu masuk" bagi Jusuf Kalla untuk menengahi konflik etnik di negeri tersebut.

Ketika Kalla kembali berkunjung ke negeri itu, 7-12 September 2012, lagi-lagi acara formal lekat dengan sarung. Pada penandatanganan kerja sama antara PMI dan Palang Merah Myanmar, di Yangon, sejumlah tokoh hadir mengenakan kain sarung, termasuk Presiden Palang Merah Myanmar Tha Hla Shwe. "Kaum sarungan" juga mewarnai acara dialog perdamaian di Naypyidaw. Anggota

¹⁰² *Siaran pers pimpinan daerah muhammadiyah kota medan.* <http://media.com/news/read/2012/27/08>. (diakses pada 20 Oktober 2012).

kabinet pemerintahan junta militer itu mengenakan sarung, termasuk pemimpin komite upaya perdamaian Myanmar U Aung Min. Untuk menghargai tuan rumah, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin yang mendampingi Kalla rela melepas celana panjangnya dan kemudian mengenakan sarung. Demi mengikat hubungan emosional antara orang Myanmar dan orang Indonesia, Kalla menjelaskan bahwa masyarakat di daerah asalnya, Sulawesi Selatan, juga lekat dengan sarung. Sumbangan PMI untuk korban konflik di Rohingya-Rakhine antara lain berupa 10.000 lembar sarung, berikut 3.000 lembar selimut.

Misi kunjungan Kalla pada Agustus lalu adalah menengahi konflik komunal yang sudah menelan korban sekitar 80 jiwa. Adapun misi kunjungan pada September ini sedikit lebih luas. Selain memantapkan rencana rehabilitasi permukiman dan rekonsiliasi sosial bagi para pengungsi suku-suku yang bertikai, Kalla juga bermisi membantu menuntaskan konflik tersebut. Semua konflik bisa diselesaikan asalkan mengedepankan kompromi. Semua pihak harus merasa dihargai dan nyaman. Dialog itu juga menampilkan delegasi dari Filipina, terdiri dari Teresita Deles Quintos, Miriam Coronel Ferrer (pejabat dari Kantor Presiden Filipina). U Aung Min menilai kiprah Kalla menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik etnik di Myanmar.¹⁰³

¹⁰³ Ditinjau dari sumber data: *PI dan Peran Masyarakat*, <http://internasional.kompas.com/02504457>

D. Implikasi bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri

Faktor politik domestik Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya tidaklah lepas dari pengaruh politik domestik yaitu *policy influencers* yang berada disekeliling para pengambil kebijakan, seperti partai politik islam (PAN,PKS), ormas Islam (Muhammadiyah, PBNU), organisasi semi pemerintah islam (MUI) dan pergerakan mahasiswa islam (KAMMI) semuanya mendukung, tidak tinggal diam, turut prihatin dan Indonesia juga didesak harus berjuang dalam ranah diplomasi regional dan internasional. Dalam memperjuangkan kesamaan hak, penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya.

Artikulasi atau cara pandang masyarakat muslim diantaranya adalah *pertama*, demonstrasi yang merupakan sarana untuk menyatakan pendapat kelompok/penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Para aktifis dari berbagai ormas menggelar demonstrasi di Gedung sekretariat ASEAN dan mereka membakar replika bendera Myanmar sebagai simbol ketidakberdayaan ASEAN. Aksi demonstran yang tergabung dalam MPR (Masyarakat Peduli Rohingya), diantaranya juga terdapat berbagai partai, seperti: PAN, PKS, PKB dan tokoh dari berbagai ormas lainnya berunjuk rasa didepan kedubes Myanmar seperti KAMMI. Mereka mewarnai aksinya dengan lempar jumroh dengan melempar segenggam kertas putih secara bersama-sama. Para demonstran kecewa karena hingga saat ini belum ada pihak dari kedubes Myanmar yang menanggapi tuntutan mereka.

Kedua, Liputan media massa yang memainkan peran penting dalam arena

wartawan di Medan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Medan Drs. Adri K dan Sekretaris Muhammad Syafi'i Lubis di Sekretariat menyerukan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah untuk menyelenggarakan shalat Ghaib dan penggalangan dana atas anjuran dari Prof. Dr. Din Syamsuddin, yang kemudian akan disalurkan kepada para pengungsi Rohingya. Dalam media komunikasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutus Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menjadi utusan kasus Myanmar dan langsung bertemu dengan Presiden Thein Sein pada Agustus dan September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Jusuf Kalla menggunakan Diplomasi Sarung untuk mpendekatkan PI dengan Myanmar